

PEMBERDAYAAN GAPOKTAN PUAP KALIMANTAN BARAT SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS PETANI DI PEDESAAN
(Empowerment GAPOKTAN PUAP West Kalimantan as Microfinance Institutions In Rural Farmers Agribusiness)

Rusli Burhansyah

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
E-mail: rburhansyah@gmail.com

ABSTRACT

One problem faced by farmers include low income. This is due to rendahnya level of productivity resulting from the lack of information technology and farming capital. To overcome the need to program a breakthrough. One of the breakthrough program through Rural Agribusiness Program (PUAP). PUAP in West Kalimantan has entered its third year. To what extent is the performance of West Kalimantan Province Gapoktan PUAP entering the third year? How is the effort that must be done so Gapoktan PUAP as LKMA. To answer the need of a review. The purpose of writing this paper is to see the performance PUAP Gapoktan development and empowerment of Microfinance Institutions in Rural Farmers Agribusiness. The study was conducted in 12 districts receiving funds PUAP BLM. This study uses survey methods. The survey used a questionnaire to the respondent. Retrieving data using the method kuesiner terstruktur. Respondents are gapoktan observed indicators include disbursement of funds, financial development, problems faced by Supervisor Partner Farmer, PPL Pedamping And LO BPTP. Analysis of descriptive data on the progress, problems and development strategi Gapoktan PUAP 2008 and 2009 as the Institute of Agribusiness on Rural Microfinance. Most of the RUB is still used for its cultivation of food crops, plantations, livestock, and horticulture. Performance PUAP not optimal distribution of funds. Reporting disbursements of official development has not been optimal. This is due to various problems. To prepare Gapoktan PUAP as has been done LKMA rating. Results There are 25 gapoktan rating in 2008 and 33 gapoktan in 2009 as microfinance Institutions Agribusiness. Empowerment Gapoktan PUAP be LKMA stages require, among other things: (1) Identification of Needs, (2) Socialization Activities MFI-A, (3) Establishment of Board And Management MFI-A, (4) Preparation of Articles of Association (AD) And Budget Household (ART), (5) Operationalization LKM-A, and (6) Development of the MFI-A. Entry point empowerment strategy Gapoktan PUAP as LKMA namely the existence of cross-scientific studies

Keywords: PUAP, Empowerment Gapoktan PUAP, LKMA

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian menghadapi permasalahan yang klasik yakni rendahnya pendapatan petani. Rendahnya pendapatan ini diakibatkan dari rendahnya produktivitas di tingkat petani. Hal ini akibat dari tidak tersedianya informasi teknologi maju dan tidak tersedianya modal kerja. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu produk yang dihasilkan oleh petani sehingga harga yang diterima petani rendah. Salah satu upaya mengatasi permodalan dengan Program PUAP.

Sejak tahun 2008 Departemen Pertanian melaksanakan terobosan program dalam pembangunan pertanian yang diberi naman Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Program ini terkait erat dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang berada dibawah

koordinasi Kantor Menko Kesejahteraan Rakyat. Program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah (Departemen Pertanian, 2008).

Gapoktan PUAP merupakan suatu lembaga petani di pedesaan yang diharapkan sebagai lembaga pembiayaan agribisnis pedesaan. Lembaga pembiayaan agribisnis berperan sebagai salah satu unsur pelancar bagi keberhasilan dalam program pembangunan sektor pertanian. Peranan kredit bukan saja sebagai pelancar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi unsur pemacu adopsi teknologi yang diharapkan mampu meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat (Syukur *et al*, 1993).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis merupakan Lembaga intermediasi keuangan bagi para anggota kelompok tani dan warga yang terpilih dari lingkungan ikatan pemersatunya (tingkat desa) yang bersepakat untuk bekerjasama saling menolong dengan menabung secara teratur dan terus-menerus sehingga terbentuk modal bersama yang terus berkembang, guna dipinjamkan kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dengan tingkat bagihasil/jasa tabungan maupun pembiayaan yang layak dan bersaing.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai modal pembangunan pertanian di Indonesia sangat penting. Berangkat dari sejarah tentang keberadaan lembaga keuangan mikro di pedesaan. Masyarakat Indonesia sejak lama mengembangkan keuangan mikro, seperti: arisan, lumbung pith nagari, lumbung desa, jimpitan, dsb. Beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) mengembangkan LKM Non Bank yang secara riil juga memberikan pelayanan keuangan mikro, seperti : PINBUK dengan BMT (dan/atau BaiQi khusus di NAD) dan POKUSMA, BK3I dengan Credit Union/Kopdit, Alisa Khadijah dengan SUA, Majelis Ekonomi Muhammadiyah dengan BTM, Lembaga Ekonomi NU dengan Syirkah Muawanah, beberapa repikator Grameen, ASA, dsb.

Pemerintah melalui berbagai program dan proyek juga mengembangkan konsep keuangan mikro, seperti : BKD, LPD, IDT, PPK, P4K, Takesra – Kukesra, P2KP, UED-SP, P2FM, BMT-KUBE, PEMP, MAP, PEMP, LPT INDAK, P2KER, LEPM, P3KUM, PERKASSA, KPRS, PUAP, PNPM dan sebagainya. Berbagai lembaga keuangan berbentuk bank terlibat dalam pengembangan keuangan skala mikro: BRI Unit, Bukopin, Danamon Simpan Pinjam, BPR, dan BPRS. Pendekatan keuangan mikro lintas pelaku: Program Hubungan Bank dengan KSM (PHBK) yang kemudian lebih riil berkembang Hubungan Bank dengan LKM (HBL) atau *Linkage Program*

Melihat dari permasalahan tersebut diatas, ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapat jawaban terkait dengan Gapoktan PUAP. Bagaimana kondisi Gapoktan PUAP Kalimantan Barat sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis? Apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Gapoktan PUAP? Bagaimana solusi dan strategi pemberdayaan Gapoktan PUAP sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Pedesaan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan kajian

pemberdayaan Gapoktan PUAP Kalimantan Barat Menuju Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mandiri.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat kinerja perkembangan Gapoktan PUAP dan pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Petani di Pedesaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di semua lokasi kabupaten penerima dana BLM PUAP tahun 2008 dan 2009 provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian dilakukan bulan Oktober 2010.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey. Survey menggunakan kuesioner pada responden. Pengambilan data menggunakan metode kuesioner terstruktur. Responden merupakan gapoktan Indikator yang diamati antara lain penyaluran dana, perkembangan keuangan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Penyelia Mitra Petani, PPL Pedamping Dan LO BPTP.

Analisis Data

Analisis data secara deskriptif terhadap perkembangan, permasalahan dan strategi pengembangan Gapoktan PUAP 2008 dan 2009 sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Pedesaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal Gapoktan 2008 dan 2009

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008 menerima dana BLM PUAP pada 234 Gapoktan yang tersebar pada 11 kabupaten (Tabel 1). Dari dana sebesar Rp 22, 4 Miliar sebagian besar (78,3%) digunakan untuk kegiatan Budidaya dan sisanya untuk kegiatan non budidaya. Kabupaten yang menerima dana PUAP diatas 10% dari dana total Provinsi berturut-turut yakni kabupaten Landak, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi dan Pontianak (Kab. Pontianak dan Kubu Raya).

Pada tahun 2009 Dana PUAP yang diterima Gapoktan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 20,5 M dengan jumlah gapoktan sebanyak 221 buah. Penggunaan Dana PUAP sebagian besar (75,82%) untuk kegiatan Budidaya dan 24,18% digunakan untuk Non Budidaya (Tabel 2). Pada tahun 2009 sebaran dana BLM PUAP merata di semua kabupaten. Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Pontianak (Pontianak dan

Kubu Raya dan Sintang merupakan Gapoktan dengan penerima dana masing-masing Rp 2 Milyar untuk 20 Gapoktan.

Tabel. 1. Kondisi Awal Gapoktan, PPL Pendamping, PMT, RUB Gapoktan PUAP 2008

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota Poktan (Orang)	Jumlah Poktan	Jumlah Penyuluh Pendamping (Orang)	Jumlah Penyuluh Mitra Lini (Orang)	RUB		Total (Rp000)
							Budidaya (Rp000)	Non Budidaya (Rp000)	
1	KAB BENGKAYANG	15	4.120	221	35	1	2.713.000	87.000	2.800.000
2	KAB KAPUAS HULU	25	4.473	189	45	2	2.500.000	0	2.500.000
3	KAB RAYONG UTARA	12	2.534	184	33	2	433.000	767.000	1.200.000
4	KAB KETAPANG	13	4.412	239	28	0	562.000	738.000	1.300.000
5	KAB LANDAK	35	5.440	267	54	2	3.350.000	150.000	3.500.000
6	KAB MELAWI	28	1.335	129	22	1	2.730.500	49.500	2.800.000
7	KAB PONTIANAK	26	929	541	48	3	1.552.230	1.047.770	2.600.000
8	KAB SAMBAS	10	1.733	228	25	1	941.000	59.000	1.000.000
9	KAB SANGGAU	9	3.240	168	24	1	340.000	560.000	900.000
10	KAB SEKADAU	10	523	60	9	1	855.000	145.000	1.000.000
11	KAB SINTANG	28	1.885	275	40	2	1.562.275	1.237.725	2.800.000
TOTAL		234	30.624	2.501	363	16	17.539.000	4.860.995	22.400.000

Tabel 2. Kondisi Awal Gapoktan, PPL Pendamping, PMT, RUB Gapoktan PUAP 2009

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota Poktan (Orang)	Jumlah Poktan	Jumlah Penyuluh Pendamping (Orang)	Jumlah Penyuluh Mitra Lini (Orang)	RUB		Total (Rp000)
							Budidaya (Rp000)	Non Budidaya (Rp000)	
1	KAB BENGKAYANG	15	4.120	221	35	1	1.265.730	234.270	1.500.000
2	KAB KAPUAS HULU	20	4.473	189	45	2	2.000.000		2.000.000
3	KAB RAYONG UTARA	15	2.534	184	33	2	1.055.145	444.855	1.500.000
4	KAB KETAPANG	20	4.412	239	28	0	1.700.000	300.000	2.000.000
5	KAB LANDAK	20	5.440	267	54	2	1.899.600	100.400	2.000.000
6	KAB MELAWI	20	1.335	129	22	1	1.400.000	600.000	2.000.000
7	KAB PONTIANAK	20	929	541	48	3	1.841.200	158.800	2.000.000
8	KAB SAMBAS	15	1.733	228	25	1	1.137.000	363.000	1.500.000
9	KAB SANGGAU	15	3.240	168	24	1	492.000	1.008.000	1.500.000
10	KAB SEKADAU	15	523	60	9	1	1.000.100	499.900	1.500.000
11	KAB SINTANG	20	1.885	275	40	2	1.003.000	497.000	1.500.000
TOTAL		221	30.624	2.491	363	16	18.643.776	4.966.216	20.600.000

Sumber:Data Primer, 2009

Kinerja Gapoktan PUAP 2008 dan 2009 (Aspek Keuangan)

Gapoktan PUAP diharapkan sebagai model pemberdayaan kelembagaan petani khususnya lembaga pembiayaan agribisnis di pedesaan. Salah satu indikator untuk menilai Gapoktan sebagai lembaga keuangan mikro agribisnis dengan melihat kinerja dari penyaluran dana dan pendapatannya (Tabel 3). Dari Tabel 3 terlihat bahwa hanya 3 kabupaten yang melaporkan penyaluran dana BLM PUAP.

Tabel 3. Nilai Penyaluran, Jumlah Nilai Usaha Akhir Gapoktan PUAP 2008

NO	Kab/kota	Jumlah Penerima Dana (orang)	Jum. Modal Usaha (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Jumlah Nilai Usaha Akhir (Rp)	Saldo (Rp)	Pendapatan (Rp)	(%)
1	Kab. Bengkayang	0a	2.000.000.000	0a	0a	2.000.000.000		
2	Kab. Kapuas Hulu	1.319	2.500.000.000	2.342.389.000	2.342.389.000	157.611.000		
3	Kab. Kayong Utara	0a	1.200.000.000	0a	0a	1.200.000.000		
4	Kab. Ketapang	30	1.300.000.000	0a	150.000.000	1.300.000.000		
5	Kab. Landak	0a	3.500.000.000	0a	0a	3.500.000.000		
6	Kab. Melawi	0a	2.000.000.000	0a	0a	2.000.000.000		
7	Kab. Pontianak	0a	2.600.000.000	0a	0a	2.600.000.000		
8	Kab. Sambas	Na	1.000.000.000	0a	0a	1.000.000.000		
9	Kab. Sanggau	93	900.000.000	590.574.000	720.091.950	309.426.000	137.517.950	15,28%
10	Kab. Sekadau	0a	1.000.000.000	0a	0a	1.000.000.000		
11	Kab. Sintang	79	2.000.000.000	2.900.000.000	3.284.879.000	-	484.879.000	17,32%
TOTAL		1.521	22.400.000.000	5.732.963.000	6.355.359.950	16.607.037.000	622.396.950	2,78%

Sumber:Data Primer, 2008

Keterangan: Na= tidak ada data

Pada tahun 2009 kinerja Gapoktan PUAP dalam penyaluran dana dan keuangan mikro kondisinya relatif sama dengan tahun 2008. Hanya kabupaten Sanggau yang melaporkan nilai penyaluran dan jumlah nilai usaha akhir (Tabel 4).

Tabel 4. Nilai Penyaluran, Jumlah Nilai Usaha Akhir Gapoktan PUAP 2009

NO	Kab/kota	Jumlah Penerima Dana (orang)	Jum. Modal Usaha (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Jumlah Nilai Usaha Akhir (Rp)	Saldo (Rp)	Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
1	Kab. Bengkayang		1.500.000.000			1.500.000.000		
2	Kab. Kapuas Hulu		2.000.000.000			2.000.000.000		
3	Kab. Kayong Utara		1.500.000.000			1.500.000.000		
4	Kab. Ketapang	12	2.000.000.000			2.000.000.000		
5	Kab. Landak		2.000.000.000			2.000.000.000		
6	Kab. Melawi		2.000.000.000			2.000.000.000		
7	Kab. Pontianak		2.000.000.000			2.000.000.000		
8	Kab. Sambas		1.500.000.000			1.500.000.000		
9	Kab. Sanggau		1.500.000.000	943.847.500	1.666.549.920	556.152.500		
10	Kab. Sekadau		1.500.000.000			1.500.000.000		
11	Kab. Sintang	960	1.500.000.000	895.419.100		1.500.000.000		
12	Kab. Kubu Raya		1.500.000.000			1.500.000.000		
TOTAL		962	20.500.000.000	943.847.500	2.561.969.020	13.056.152.500		

Sumber:Data Primer, 2008

Keterangan: Na= tidak ada data

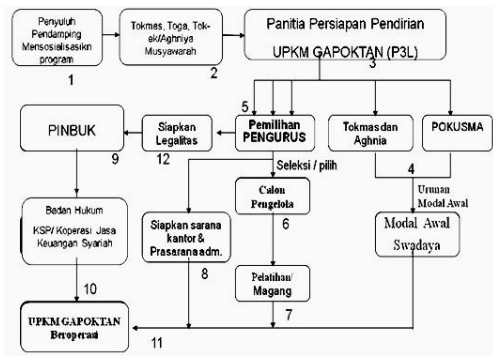
Gapoktan PUAP dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga keuangan mikro agribisnis di pedesaan. Untuk mendukung Gapoktan PUAP tahun 2008 dan 2009 sebagai lembaga keuangan mikro agribisnis diperlukan beberapa tahapan. Tahapan antara lain rating Gapoktan PUAP dan pelatihan LKMA.

Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Pedesaan

Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi LKMA memerlukan tahapan-tahapan, antara lain :

1. Identifikasi Kebutuhan.
2. Sosialisasi Kegiatan Lkm-A.
3. Pembentukan Pengurus dan Pengelola Lkm-A,
4. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Operasionalisasi LKM-A.
6. Pengembangan LKM-A.

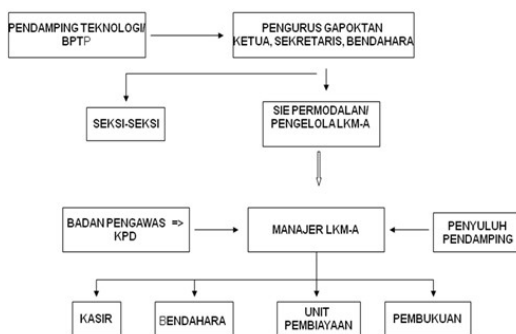
Secara garis besar tahapan pendirian LKMA PUAP Gapoktan (Gambar 1) yaitu pertama dimulai PPL pendamping dan PMT men sosialisasikan program kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama beserta pejabat yang berwenang. Dari kesempatan bersama dibentuk Panitia Persiapan Pendirian LKMA. Selanjutnya diadakan modal awal swadaya yang berasal dari anggota, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pejabat (Lurah/Kepala Desa setempat)



Gambar 1. Tahapan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis

Tahapan kelima pemilihan pengurus, Dari pemilihan pengurus maka dipilih pengurus yang mempunyai persyaratan untuk mengelola LKMA. Persyaratan antara lain; tingkat pendidikan minimal SMTA, mempunyai sifat mandiri, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap kemajuan dan pengembangan LKMA. Menetapkan calon pengelola LKMA. Calon Pengelola LKMA wajib mengikuti pelatihan dan magang. Pengurus Gapoktan menyiapkan sarana dan prasarana. Tahapan yang penting yakni menyiapkan legalitas (payung hukum) dari LKMA mulai dari PINBUK, Badan Hukum berbentuk Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Keuangan Syariah, Koperasi Credit Union. Tahapan terakhir adalah Unit Pengelola Keuangan Mikro Gapoktan Beroperasi.

Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis merupakan bagian dari struktur organisasi Gapoktan. (Gambar 2). BPTP berperan pendamping teknologi. Pengurus Gapoktan membentuk seksi permodalan/pengelola LKMA. Dalam pengelola LKMA keberadaan Manajer LKMA menjadi suatu keharusan. Dalam operasionalnya manajer LKMA dibantu Badan Pengawas KPD, dan Penyuluh Pendamping, Manajer LKMA membentuk seksi antara lain kasir, bendahara, unit pembiayaan dan pembukuan.



Gambar 2. Struktur organisasi LKMA pada

Gapoktan PUAP

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi calon LKMA PUAP Gapoktan Kalimantan Barat

1. Sosialisasi Gapoktan PUAP sebagai LKMA belum optimal
2. Laporan penyaluran dana BLM Gapoktan PUAP tahun 2008 dan 2009 belum lengkap. Hal ini karena data dari PMT banyak yang belum menyampaikan data ke BPTP Kalimantan Barat sebagai Sekretaris PUAP Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi ini berkaitan dengan letak geografis desa penerima dana PUAP yang jauh, pedalaman, terisolir, infrastruktur yang minim. Hal ini membuat biaya operasional pendampingan Gapoktan PUAP baik oleh PMT dan PPL menjadi mahal.
3. Koordinasi yang belum optimal antara provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Luasnya wilayah, terbatasnya SDM pendamping, minimnya dana pendamping dari pemerintah kabupaten/kota setempat menyebabkan kinerja petugas pendamping Gapoktan PUAP tidak optimal.
4. Persepsi masyarakat tentang program PUAP masih belum baik, PUAP sebagai program relatif baru memerlukan sosialisasi yang rutin dan berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat pedesaan. Persepsi sebagian masyarakat bahwa PUAP merupakan bantuan dan hibah menyebabkan dana di sebagian besar Gapoktan PUAP masih macet.

Dalam operasionalisasi LKMA ini dilakukan evaluasi dinamika komponen pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial petani sekaligus dilakukan pula pemantauan proses perubahan sosial sebagai resultan interaksi introduksi model pemberdayaan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. *Entry point* strategi pemberdayaan Gapoktan PUAP sebagai LKMA yaitu adanya kajian lintas keilmuan. Hasil kajian disepakati untuk disosialisasikan sebagai penyempurnaan LKMA di masa mendatang. Sosialisasikan LKMA kepada aparat yang terkait dengan program pembangunan setempat termasuk pejabat struktural dan kelompok penyusun kebijakan daerah.

KESIMPULAN

1. Program Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan salah satu terobosan dalam pembangunan pertanian di pedesaan. dari sisi kelembagaan pembiayaan
2. Kondisi kinerja penyaluran dana BLM Gapoktan PUAP belum optimal. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan antara lain; letak geografis, pendampingan dari pemerintah kabupaten.kota yang belum optimal.
3. Pemberdayaan Gapoktan PUAP menjadi LKMA memerlukan tahapan-tahapan, antara lain : (1) Identifikasi Kebutuhan, (2) Sosialisasi Kegiatan Lkm-A, (3) Pembentukan Pengurus Dan Pengelola Lkm-A, (4) Penyusunan Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART), (5) Operasionalisasi LKM-A, dan (6) Pengembangan LKM-A

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Untuk Sektor Pertanian Forum Agro Ekonomi Vol 23 (2). 82-91. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Blitary, A.B. 2010. Memberdayakan Usaha Petani / Agribisnis Perdesaan Melalui pendekatan Keuangan Mikro (Konsep Dasar Lkm Agribisnis) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil - PINBUK
- Departemen Pertanian. 2008. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Deptan. Jakarta
- Departemen Pertanian. 2009. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Deptan. Jakarta
- Hendayana, R. 2010. Apresiasi Pengelolaan dan Operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Sudaryanto, T. dan M.Syukur. 2001. Pengembangan Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Perdesaan .Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Suprpto, A. 2010. Manajemen Pembiayaan/PinjamanPusat Pengembangan Penyuluh Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian
- _____. 2010. Sumber Dana Keuangan Mikro.Pusat Pengembangan Penyuluh Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian
- Suradisastra, K. 2008. Stategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani,.Forum Agro Ekonomi Vol 26 (2). 82-91. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian